

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 26 September 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Pelaksanaan UU Kesehatan Siap Dikawal

SEMARANG - Para alumni Magister Hukum Kesehatan (MHKes) Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata siap mengawal pelaksanaan UU No 17/2023 Tentang Kesehatan. Para alumni siap berperan aktif untuk mendukung bila memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat serta siap mengkritisi bila hasilnya merugikan masyarakat.

"Kami tidak akan menolak undang-undang yang sudah disahkan itu. Para alumni akan ikut mengawasi pelaksanaannya di masyarakat," kata Ketua Ikatan Alumni MHKes Unika Dr dr Dodik Tugaworo Pramukarso SpS (K) MHKes yang baru terpilih Periode 2023-2027, belum lama ini dalam Kongres Ikatan Alumni MHKes di Gedung Thomas Aquinas, Kampus Benda Duwur, belum lama ini.

Selain Kongres Alumni, digelar pula Musyawarah Wilayah (Muswil) Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Jateng. Dalam Muswil yang dihadiri Ketua Umum MHKI Dr Mahesa Paranadipa SH MH itu kembali terpilih Ketua Progd MHKes Unika Dr Endang Wahyati Y SH MH sebagai Ketua MHKI Wilayah Jateng Periode 2023-2026.

Sebelumnya digelar seminar berkaitan dengan UU Kesehatan yang baru Nomor 17 Tahun 2023.

Tampil sebagai pembicara Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dr Yanti Herman. "Kegiatan ini diadakan secara daring dan luring yang diikuti ratusan alumni yang berada dimanapun," kata Endang Wahyati.

Dalam seminar itu, Yanti Herman menjelaskan latar belakang dibuatnya UU No 17/2023 tentang Kesehatan. Salah satunya kondisi pada masa pandemi Covid-19.

"Dengan adanya pandemi, masalah kesehatan kita terlihat sekali tidak siap menerima adanya wabah semacam itu. Jadi Covid-19 memberikan pelajaran bagi kita untuk meningkatkan pelayanan dalam segala bidang berkaitan dengan kesehatan," katanya.

Hal itu terbukti dalam bidang kesehatan, katanya, begitu minimnya akses ke layanan primer yang ada di masyarakat. Serta kurangnya kapasitas pelayanan rujukan di rumah sakit. "Bahkan ketahanan kesehatan di Indonesia masih sangat lemah dan

pembiayaan kesehatan masih belum efektif," katanya.

Selain itu ujarnya, dalam bidang sumber daya masyarakat kesehatan masih kurang dan tidak merata. Ditambah lagi minimnya integrasi teknologi kesehatan dan regulasi inovasi bioteknologi.

Dengan adanya UU ini nantinya, jelas Yanti, bisa meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. (B14-26)